

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi yang terjadi dari program Gerakan Nasional Literasi Digital dalam meningkatkan kesiapan masyarakat Indonesia untuk menghadapi kejahatan siber. Secara spesifik, aktor utama dalam implementasi gerakan literasi digital ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Siberkreasi yang keduanya sebagai konseptor serta eksekutor dari gerakan literasi digital ini. Metode campuran digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan sekuensial. Data penelitian yang telah terkumpul didapatkan melalui kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Lebih lanjut, lokasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi dari program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk pencegahan kejahatan siber. Teori yang digunakan untuk mengetahui implementasi program Gerakan Nasional Literasi Digital adalah teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Teori implementasi kebijakan menurut Grindle memberikan dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Melalui kerangka teori tersebut, penelitian ini berusaha mencari tahu dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam implementasi program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mencegah kejahatan siber. Penelitian ini menyimpulkan faktor yang mempengaruhi implementasi program gerakan literasi digital adalah isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan serta konteks implementasi yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, strategi, karakteristik lembaga, kepatuhan, dan daya tanggap.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Gerakan Literasi Digital, Literasi Digital, Kejahatan Siber*

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Digital Literacy National Movement program in increasing the readiness of the Indonesian people to deal with cybercrime. Specifically, the main actors in the implementation of this digital literacy movement are the Ministry of Communication and Informatics and Siberkreasi, both of whom are the drafters and executors of this digital literacy movement. Mixed methods were used in this study with a sequential approach. The research data that has been collected was obtained through questionnaires and interview results as primary data and literature studies as secondary data. Furthermore, the location studied in this study is the Province of the Special Region of Yogyakarta. The problem behind this research is related to the implementation of the National Digital Literacy Movement program for cyber crime prevention. The theory used to determine the implementation of the National Digital Literacy Movement program is the policy implementation theory developed by Merilee S. Grindle. The theory of policy implementation according to Grindle provides two factors that influence policy implementation, namely the content of the policy and the context of implementation. Through this theoretical framework, this research seeks to find out and explain the factors that influence policy implementation in the implementation of the National Digital Literacy Movement program to prevent cyber crime. This study concludes that the factors that influence the implementation of the digital literacy movement program are policy content consisting of interests, types of benefits, degree of change, decision making, program implementers, and the resources involved as well as the context of implementation consisting of power, interests, strategies, institutional characteristics, compliance, and responsiveness.

Keywords: *Policy Implementation, Digital Literacy Movement, Digital Literacy, Cyber Crime*